

Lampiran II Peraturan Daerah

Nomor : 3 Tahun 2014

Tanggal : 20 Agustus 2014

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011-2016**

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.3.2. Proyeksi Data Masa Datang

3.3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam struktur APBD Kota Bontang masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilaksanakan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan Daerah Tahun 2011-2016 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Kota Bontang dan perekonomian nasional, dimana ketergantungan Kota Bontang yang sangat tinggi terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai sumber utama Pendapatan bagi Kota Bontang, namun disisi lain upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Gambaran kondisi ekonomi makro Indonesia Tahun 2006-2010 berdasarkan Data Pokok APBN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% dan pada tahun 2010 sebesar 5,8%. Nilai inflasi pada tahun 2006 sebesar 6,6% dan pada tahun 2010 sebesar 5,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dollar pada tahun 2006 sebesar Rp.9.705/dollar dan pada tahun 2010 sebesar Rp.9.200/dollar. Nilai SBI (suku bunga) tahun 2006 sebesar 11,7% dan pada tahun 2010 sebesar 6,5%. Harga minyak mentah pada tahun 2006 sebesar 63,8 US\$/barell dan pada tahun 2010 sebesar 80,0 US\$/barrel. Sedangkan lifting minyak bumi pada tahun 2006 sebesar 959 barell/hari dan pada tahun 2010 sebesar 965 barell/hari.

Adapun gambaran proyeksi kondisi ekonomi makro Indonesia tahun 2011-2015 berdasarkan data dari Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2011 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% dan pada tahun 2015 sebesar antara 7,8%-8,0%. Nilai inflasi pada tahun 2011 sebesar 5,3% dan pada tahun 2015 antara 2,5%-6%. Nilai tukar rupiah terhadap dollar pada tahun 2011 sebesar Rp.9.250/dollar dan pada tahun 2015 sebesar antara Rp.9.668 – Rp.11.847. Nilai SBI (suku bunga) pada tahun 2011 sebesar 6,5% dan pada tahun 2015 sebesar 3%-6%. Harga minyak mentah diproyeksikan pada tahun 2011 sebesar 80 US\$/barell dan pada tahun 2015 sebesar antara 65 US\$/barell – 100 US\$/barell. Sedangkan lifting minyak bumi pada tahun

2011 adalah sebesar 970 barell/hari dan untuk tahun 2015 diproyeksikan naik antara 0,4% s/d 1% dari lifting tahun sebelumnya.

Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2016, adalah sebagai berikut:

1. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah selama periode 2011 – 2016 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan asumsi bahwa:

- a. Adanya upaya yang simultan dan komprehensif untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- b. Upaya peningkatan kuantitas dan validitas data dari objek dan wajib pajak.
- c. Telah diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, maka Pemerintah Pusat telah memberikan beberapa kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dengan cara menambah jenis Pajak/Retribusi Daerah, meningkatkan tarif, dan melimpahkan beberapa jenis pajak yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Propinsi.
- d. Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah yang mengatur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ada beberapa penambahan jenis maupun perubahan tarif yang akan meningkatkan pendapatan daerah. Adapun beberapa penambahan dan perubahannya adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan perhitungan dari dasar pengenaan untuk Pajak Reklame.
 - Peningkatan perhitungan tarif dan dasar pengenaan untuk Pajak Penerangan Jalan.
 - Pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagai jenis pajak baru yang potensial dalam hal penerimaan.
 - Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Tahun 2011, dari sebelumnya Kota Bontang hanya mendapatkan bagi hasil 64% dari realisasi penerimaan akan menerima 100% dari realisasi penerimaan.
 - Pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah pada Tahun 2011 dari sebelumnya Kota Bontang hanya mendapatkan bagi hasil 70% dari realisasi penerimaan akan menerima 100% dari realisasi penerimaan.
 - Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan pada tahun 2012, dari sebelumnya Kota Bontang hanya mendapatkan bagi hasil 64,8% dari realisasi penerimaan akan menerima 100% dari realisasi penerimaan.
 - Penambahan jenis maupun tarif dari retribusi daerah.

2. Dana Perimbangan

Penerimaan dari pos Dana Perimbangan periode 2011 – 2016 diperkirakan juga mengalami peningkatan dengan asumsi bahwa:

- a. Harga minyak bumi dan gas bumi serta pencapaian lifting yang relatif mengalami peningkatan di setiap tahunnya, sebagai dasar perhitungan Dana Bagi Hasil Migas ke Kota Bontang.
- b. Trend kenaikan harga jual komoditas batubara sehingga menyebabkan peningkatan Dana Bagi Hasil Royalti pada daerah penghasil namun tetap berpengaruh positif untuk Kota Bontang sebagai daerah pemerataan.
- c. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Kantor Pelayanan Pajak dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh)
- d. Adanya rencana perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah diharapkan akan memberikan peningkatan penerimaan yang lebih besar baik kepada daerah penghasil maupun kepada daerah pengolah minyak bumi dan gas bumi
- e. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kembali diterima Kota Bontang pada Tahun 2011 dan diproyeksikan pada tahun-tahun berikutnya Kota Bontang tetap menerima DAU dan DAK, setelah pada Tahun Anggaran 2010 Kota Bontang tidak mendapatkan penerimaan dari DAU dan DAK.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari pos lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah selama periode 2011 – 2016 diharapkan akan mengalami peningkatan pula dengan asumsi bahwa:

- a. Peningkatan jumlah kendaraan dan penggunaan bahan bakar kendaraan pada setiap tahunnya serta pemungutan Pajak Rokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 yang berpengaruh kepada peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi.
- b. Proyeksi peningkatan penerimaan dari Bantuan Keuangan Propinsi sesuai dengan kebutuhan belanja di Kota Bontang.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas maka proyeksi pendapatan daerah Kota Bontang selama periode 2011 – 2016 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2011 - 2016

No.	Uraian	Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp.)					
		2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
I.	Pendapatan Daerah	1.148.083.241.777,35	1.331.491.010.022,00	1.388.687.547.665,48	1.415.943.099.252,00	1.458.860.989.775,00	1.541.632.775.052,00
1.	Pendapatan Asli Daerah	67.240.933.895,20	84.995.912.920,00	105.549.621.544,00	109.949.832.775,00	123.289.707.826,00	124.079.272.471,00
1.1.	Hasil Pajak Daerah	22.482.500.000,00	30.209.000.000,00	43.740.000.000,00	41.755.509.704,00	48.018.836.160,00	46.884.793.568,00
1.2.	Hasil Retribusi Daerah	3.224.700.000,00	3.406.500.000,00	4.301.500.000,00	5.142.325.764,00	5.913.674.629,00	6.709.332.675,00
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.815.314.290,20	85.000.000.000,00	10.000.000.000,00	14.040.479.904,00	15.444.527.894,00	16.811.801.248,00
1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.718.419.605,00	42.880.412.920,00	47.508.121.544,00	49.011.517.403,00	53.912.669.143,00	53.673.344.980,00
2.	Dana Perimbangan	907.465.771.726,09	970.192.280.509,00	1.007.743.919.121,48	1.038.021.238.444,00	1.071.012.790.389,00	1.131.818.865.820,00
2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	808.709.926.726,09	835.648.556.509,00	867.634.591.121,48	920.493.249.786,00	948.108.047.280,00	954.576.447.976,00
2.2.	Dana Alokasi Umum	93.935.545.000,00	134.543.724.000,00	140.109.328.000,00	117.527.988.658,00	122.904.743.109,00	177.242.417.844,00
2.3.	Dana Alokasi Khusus	4.820.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	173.376.536.156,06	276.302.816.593,00	275.394.007.000,00	267.972.028.033,00	264.558.491.560,00	285.734.636.761,00
3.1.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107.946.468.836,06	128.207.423.593,00	162.116.177.000,00	132.272.528.846,00	145.699.781.732,00	138.265.412.262,00
3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.139.967.320,00	21.445.333.000,00	24.745.230.000,00	25.496.990.087,00	26.271.58.646,00	27.488.062.751,00
3.3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.790.100.000,00	126.150.060.000,00	86.532.600.000,00	108.202.509.100,00	116.858.709.828,00	117.981.161.748,00
3.4.	Penerimaan Lain-Lain	500.000.000,00	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Sumber : DPPKA Kota Bontang Tahun 2013

3.3.2.1. Belanja Daerah

Gambaran kebutuhan belanja daerah yang mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung selama 5 tahun kedepan (2011 -2016) dapat diproyeksikan dalam rangka penghitungan kerangka pendanaan pembangunan yang secara rinci disajikan pada Tabel 3.12 tentang Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Bontang 2011 – 2016 dan Tabel 3.13 tentang Proyeksi Total Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang 2011 – 2016.

Tabel 3.12.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kota Bontang 2011 – 2016

No	Uraian	Data Tahun Dasar (2010) (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	196.125.392.482,00		239.465.325.360,00	269.657.010.759,00	292.208.125.114,00	351.500.000.000,00	263.545.531.050,95	279.113.262.914,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	190.771.672.074,00	6	230.625.325.360,00	261.907.010.759,00	284.668.120.114,00	343.500.000.000,00	255.295.531.050,95	270.613.262.914,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.190.000.000,00	6,0%	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00	2.500.000.000,00	2.750.000.000,00	3.000.000.000,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,0%	0	0	0,00	0	0	0
4	Belanja bagi hasil	0,00	0,0%	0	0	0,00	0	0	0
5	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	3.163.720.408,00	1,0%	6.550.000.000,00	5.460.000.000,00	5.250.005.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
B	Belanja Langsung	41.993.996.141,00		55.533.338.996,00	72.642.570.270,00	118.778.831.480,00	52.248.729.202,49	43.753.799.261,13	44.782.085.730,55
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	11.809.934.714,00	2,5%	12.176.974.000,00	17.664.715.500,00	18.541.333.000,00	22.480.274.574,00	13.361.857.129,12	13.695.903.557,35
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.520.665.000,00	2,5%	2.213.500.000,00	2.756.720.000,00	960.000.000,00	2.782.342.519,95	2.851.901.082,95	2.923.198.610,02
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	23.641.940.417,00	2,5%	34.905.589.496,00	44.858.259.770,00	89.432.875.480,00	26.096.278.591,67	26.748.685.556,46	27.417.402.695,38
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	3.368.670.100,00	-50,0%	5.545.368.000,00	6.023.465.000,00	7.228.087.500,00	210.541.881,25	105.270.940,63	52.635.470,31
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	652.785.910,00	1,0%	691.907.500,00	1.339.410.000,00	2.616.535.500,00	679.291.635,62	686.084.551,97	692.945.397,49
C	Pengeluaran Pembiayaan	35.653.225.000,00		47.790.565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
2	Pembayaran pokok utang	35.653.225.000,00	-100,0%	47.790.565.500,00	0	0	0	0	0
TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA				342.789.229.856,00	342.299.581.029,00	410.986.956.594,00	403.748.729.202,49	307.299.330.312,08	323.895.348.644,55

Sumber : DPPKA Kota Bontang Tahun 2013

Tabel 3.13.
Proyeksi Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang 2011 – 2016

No	Uraian	Proyeksi Belanja					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	410.147.707.586,00	444.913.340.542,00	470.765.949.314,00	404.793.619.000,00	424.201.347.783,00	444.706.191.362,00
1	Belanja Pegawai	244.662.930.386,00	288.953.402.742,00	332.790.949.314,00	343.318.619.000,00	362.726.347.783,00	383.231.191.362,00
2	Belanja Bunga	0	0	0,00	0	0	0
3	Belanja Subsidi	12.825.220.000,00	3.179.355.000,00	0,00	0	0	0
4	Belanja Hibah	124.842.357.200,00	148.410.582.800,00	115.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	26.817.200.000,00	2.895.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0	0	0,00	0	0	0
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00
8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	17.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
B	Belanja Langsung	708.800.767.836,00	1.095.819.516.273,00	1.325.500.821.570,00	1.143.071.335.000,00	1.109.659.641.992,00	1.171.926.583.690,00
1	Belanja Pegawai	97.243.504.127,00	122.134.257.978,00	111.749.800.000,00	102.876.420.150,00	102.041.878.680,00	98.711.690.060,00
2	Belanja Barang dan Jasa	295.655.188.309,00	397.853.749.721,00	547.062.737.390,00	468.659.247.350,00	464.857.447.320,00	449.686.588.054,00
3	Belanja Modal	315.902.075.400,00	575.831.508.574,00	666.688.284.180,00	571.535.667.500,00	542.760.315.992,00	623.528.305.576,00
C	Pengeluaran Pembiayaan	47.790.565.500,00	34.000.000.000,00	50.000.000.000,00	82.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	34.000.000.000,00	50.000.000.000,00	82.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
3	Pembayaran pokok utang	47.790.565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BELANJA		1.166.739.040.922,00	1.574.732.856.815,00	1.846.266.770.884,00	1.629.864.954.000,00	1.583.860.989.775,00	1.666.632.775.052,00

Sumber : DPPKA Kota Bontang Tahun 2013

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan gambaran pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, serta gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bontang dan rencana penggunaannya dapat diproyeksikan untuk lima tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD Kota Bontang 2011-2016. Secara rinci hal ini disajikan pada Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Kota Bontang

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pendapatan	1.148.083.241.777,35	1.331.491.010.022,00	1.388.687.547.665,48	1.415.943.099.252,00	1.458.860.989.775,00	1.541.632.775.052,00
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	18.655.799.144,65	243.241.846.793,00	457.579.223.218,52	213.921.854.748	125.000.000.000	125.000.000.000
	Total penerimaan	1.166.739.040.922,00	1.574.732.856.815,00	1.846.266.770.884,00	1.629.864.954.000,00	1.583.860.989.775,00	1.666.632.775.052,00
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	342.789.229.856,00	342.299.581.029,00	410.986.956.594,00	403.748.729.202,49	307.299.330.312,08	323.895.348.644,55
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	823.949.811.066,00	1.232.433.275.786,00	1.435.279.814.290,00	1.226.116.224.797,51	1.276.561.659.462,92	1.342.737.426.407,45

Sumber: DPPKA Kota Bontang Tahun 2013

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

1. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (*dua puluh persen*) dan kesehatan sebesar 10 % (*sepuluh persen*). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dan pemenuhan dana prioritas III dilaksanakan sejalan dengan pengalokasian dan pemenuhan dana prioritas I dan II.

Sejalan dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan sebagaimana tersebut di atas, agar pemanfaatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat lebih terarah, efektif dan efisien, maka dalam pengalokasian belanja selama lima tahun ke depan perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta (*public private partnership*) maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kota Bontang;
3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan Kota Bontang yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala kota. Sehingga dengan reorganisasi ini, diperoleh besaran organisasi yang lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaraan urusan pemerintah.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Bontang secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.15.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Bontang

No	Uraian	Proyeksi					
		2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	823.949.811.066,00	1.232.433.275.786,00	1.435.279.814.290,00	1.226.116.224.797,51	1.276.561.659.462,92	1.342.737.426.407,45
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I dan II						
II.a	Belanja Langsung	708.800.767.836,00	1.095.819.516.273,00	1.325.500.821.570,00	1.143.071.335.000,00	1.109.659.641.992,00	1.171.926.583.690,00
II.b	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dikurangi:						
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	55.533.338.996,00	72.642.570.270,00	118.778.831.480,00	52.248.729.202,49	43.753.799.261,13	44.782.085.730,55
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	47.790.565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I dan II (II.a+II.b-II.c-II.d)	605.476.863.340,00	1.023.176.946.003,00	1.206.721.990.090,00	1.090.822.605.797,51	1.065.905.842.730,87	1.127.144.497.959,45
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)						
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III						
III.a	Belanja Tidak Langsung	410.147.707.586,00	444.913.340.542,00	470.765.949.314,00	404.793.619.000,00	424.201.347.783,00	444.706.191.362,00
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	239.465.325.360,00	269.657.010.759,00	292.208.125.114,00	351.500.000.000,00	263.545.531.050,95	279.113.262.914,00
III	Total rencana pengeluaran prioritas III (III.a-III.b)	170.682.382.226,00	175.256.329.783,00	178.557.824.200,00	53.293.619.000,00	160.655.816.732,05	165.592.928.448,00
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : DPPKA Kota Bontang Tahun 2013

WALIKOTABONTANG,


ADIDARMA